

**KONTRADIKSI ANTARA KEULAMAAN DAN PERAN POLITIK ANALISIS
SYOFWATILLAH MOHZAIB SELAMA MENJADI ANGGOTA DPR RI SUMATERA
SELATAN
PERIODE 2014-2019**

Ahmad Fauzan¹, Yenrizal², Raegen Harahap³

^{1,2,3}**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**
e-mail : ahmadfauzn@gmail.com¹

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Demokrasi memberikan kemungkinan bagi semua lapisan masyarakat untuk ikut turut serta dalam mengelola pemerintahan. Oleh karena itu, selain sebagai objek pemerintahan, rakyat juga merupakan subjek karena pemerintahan berasal dan dilaksanakan oleh rakyat. Walaupun setiap rakyat punya kesempatan yang sama untuk dipilih, pada kenyataannya tidak semua orang mendaftarkan diri untuk dipilih dalam pemilu. Hal ini karena untuk dipilih, seseorang harus memiliki elektabilitas. Elektabilitas pada umumnya dimiliki oleh mereka yang dikenal secara luas oleh masyarakat, bisa dari kalangan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, artis, hingga kiai dan ulama. Di Sumatra Selatan tepatnya di Palembang ada beberapa ulama yang tertarik akan dunia politik dan bahkan sudah menjadi anggota dewan. Salah satunya yaitu ulama Syowfatillah. Kontradiksi yang didapati dari penelitian ini ialah peran sebagai politikus dan ulama yang bisa dikatakan sangat bertentangan, dimana dewasa ini dinamika politik yang terjadi di Indonesia dianggap sebagian masyarakat menyesatkan dan tidak adil lagi mensejahterakan kehidupan masyarakatnya, sedangkan peran ulama ialah sebagai tuntunan atau penyampai syiar-syiar kebajikan dalam kehidupan yang adil dan memanusiakan.

Kata Kunci: Peran Ulama, Politik, Syofwatillah

ABSTRACT

Democracy provides the possibility for all levels of society to participate in managing the government. Therefore, apart from being the object of government, the people are also subjects because government originates and is implemented by the people. Although every citizen has the same opportunity to be elected, in reality not everyone registers to be elected in the election. This is because to be elected, one must have electability. Electability is generally owned by those who are widely known by the public, from political parties, community leaders, businessmen, artists, to kiai and ulama. In South Sumatra, in Palembang, there are several Kiai who are interested in politics and have even become members of the council. One of them is Kiai Syowfatillah. The contradiction found in this research is that the roles of politicians and ulama are very contradictory, where nowadays the political dynamics that occur in Indonesia are considered by some people to be misleading and unfair to improve the welfare of the people's lives, while the role of the ulama is to guide or convey the messages. virtue in a just and humane life.

Keywords: Ulama, Politik, Syofwatillah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Demokrasi saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi memberikan kemungkinan bagi semua lapisan masyarakat untuk ikut turut serta dalam mengelola pemerintahan. Dalam bahasa populer, demokrasi kerap dimaknai sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, selain sebagai objek pemerintahan, rakyat juga merupakan subjek karena pemerintahan berasal dan dilaksanakan oleh rakyat. Dalam alam demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan, semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam mengatur pemerintahan.

Seluruh elemen masyarakat punya kewajiban dan hak yang sama. Semua anggota masyarakat berkewajiban yang sama dalam mematuhi pemerintah. Sebaliknya, seluruh rakyat juga punya hak yang sama kesempatan menjadi pemimpin. Mekanisme menentukan pemimpin dikenal dengan nama pemilu, yang merupakan akronim dari pemilihan umum. Di Indonesia, pemilu diadakan setiap lima tahun sekali.

Dalam pemilu, setiap rakyat Indonesia memiliki hak yang sama, yaitu 'hak untuk memilih dan hak untuk dipilih'. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.". Dengan demikian, selain memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat berhak untuk mendaftarkan diri agar dipilih dalam pemilu. Pemangku kebijakan dalam dunia demokrasi dibagi ke dalam tiga kekuatan, yang dikenal dengan *trias politica*.

Ketiga kelompok ini adalah kekuatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mengikuti kontestasi politik melalui legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Hal ini dijamin oleh UU tentang Hak Asasi Manusia di atas, ayat 3, "setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan." Walaupun setiap rakyat punya kesempatan yang sama untuk dipilih, pada kenyataannya tidak semua orang mendaftarkan diri untuk dipilih dalam pemilu.

Hal ini karena untuk dipilih, seseorang harus memiliki elektabilitas. Elektabilitas atau keterpilihan adalah kemampuan atau kecakapan untuk dipilih menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Semakin tinggi elektabilitas, semakin tinggi kesempatan untuk terpilih dalam pemilu. Elektabilitas pada umumnya dimiliki oleh mereka yang dikenal secara luas oleh masyarakat, bisa dari kalangan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, artis, hingga ulama.

Hal yang menarik adalah ketika peran ulama mulai diperhitungkan dalam kancah perpolitikan daerah dengan kepala daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dimana hal ini sangat tidak mungkin ditemukan ketika orde baru masih berkuasa. (nahdli, 2015)

Ulama adalah tokoh agama Islam yang berdakwah di tengah masyarakat. Mereka berdakwah dengan mendirikan pusat pendidikan yang disebut pesantren. Di sana, anak didik, yang disebut santri, berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Mereka juga aktif berkeliling menemui masyarakat secara langsung dalam berdakwah. Mereka juga dianggap sebagai orang yang terhormat di kalangan masyarakat.

Tidak mengherankan jika para kiai dikenal secara luas oleh masyarakat. Hal ini membuat kalangan ulama memiliki basis massa yang besar sehingga ikut terjun dalam dunia politik praktis. Ulama mempunyai kemampuan untuk untuk memainkan peran dan pengaruhnya karena mempunyai keunggulan-keunggulan yang melekat pada dirinya.

Ulama dapat mengelola dan mengendalikan cabang kehidupan tertentu, dimana pada gilirannya yang bersangkutan akan dapat memainkan peran dan pengaruhnya tersebut untuk menentukan corak dan arah bergulirnya roda kehidupan.(Ahmad Mikail,2015)

Ulama adalah agen perubahan yang sangat potensial, terutama dalam menjembatani kemauan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Mereka selain menjadi individu yang merdeka juga berperan sebagai *shadow player* untuk mempengaruhi kebijakan *public* yang berpihak kepada masyarakat ketika kandidat yang didukungnya dalam posisi menang. Namun, tidak semua kiai dan ulama berkecimpung dalam politik. Sebagian kiai menganggap kancah politik adalah dunia yang kotor sehingga mereka memilih untuk menghindarinya. Akan tetapi, tidak sedikit pula para pimpinan pesantren itu yang ikut terjun dalam pertarungan politik dengan berbagai latar belakang dan motif. Tulisan ini akan mengurai latar belakang para pimpinan pesantren ikut terjun dalam dunia politik.

Di Sumatra Selatan tepatnya di Palembang ada beberapa ulama yang tertarik akan dunia politik dan bahkan sudah menjadi anggota dewan. Salah satunya yaitu Syowfatillah. Syowfatillah

salah satu orang yang membuat rumah bagi Al-Quran besar, merupakan sebuah destinasi wisata (*religi*) baru yang menampilkan mushaf Al-Quran dalam tampilan yang berbeda. Oleh karena itu, hampir seluruh masyarakat di kota Palembang mengenal sosok Syowfatillah sehingga Syowfatillah mampu menarik simpati masyarakat di Sumatra Selatan.

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau pengetahuan agama islam dan pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial. Peran ulama dapat mengontrol kebijakan penguasa dan menciptakan hubungan yang baik antara pihak oposisi.

Ulama pada dasarnya ditekankan pada dua peran yang dianggap penting. Pertama, berdasarkan pada bobot keilmuannya, maka para ulama sudah sepantasnya sebagai pecerah alam pikiran umat. Kedua, posisi sebagai panutan umat, dalam artian khusus keteladanan moral yang diajarkan dan dicontohkan ulama kepada umat. (nahdli, 2015)

Kepemimpinan kharismatik Syowfatillah ini sudah umum dikenali masyarakat sehingga pengaruh Syowfatillah yang kuat “dimanfaatkan” atau menjadi incaran para politisi untuk mendulang suara. Berbagai taktik dan strategi kampanye politik yang dijalankan partai politik biasanya tidak melupakan akan arti penting peran kiai sebagai “*vote getter*” terdepan dalam mengumpulkan suara pemilih. Apalagi, semenjak bergulirnya reformasi banyak partai mengusung azas Islam sebagai *platform* dan landasan ideologis partai. Hal ini tampak sejalan dengan aktivitas Kiai yang menyebar luaskan ajaran islam. Tentu tidak dapat dihindari terjadi “pemanfaatan” kepemimpinan ulama oleh para politisi baik yang mengusung azas Islam maupun nasionalis (*pragmatism*). Oleh sebab itu tidak begitu sulit bagi syowfatillah terjun ke dunia politik. Syowfatillah masuk ke partai Demokrat, Dapil Sumatra Selatan, Komisi VIII- Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan.

Pada tahun 2009-2014 Syowfatillah berhasil menjadi anggota DPR RI setelah memperoleh suara sebanyak 59.163 suara untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan I Syowfatillah kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 50.138 suara. Saat menjadi anggota DPR 2009-2014; Syowfatillah terus-menerus berada di komisi VIII (Kesejahteraan Sosial) dengan jabatan sebagai wakil ketua komisi.

Syowfatillah juga menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012). Syowfatillah kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM

dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013). Dalam 5 tahun berada di DPR, Syofwatillah tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Syofwatillah selalu mematuhi instruksi fraksi/partai.

Keterlibatan ulama dalam dunia politik baik langsung maupun tidak langsung harus diniati atau di motivasi untuk menciptakan keadilan *social*, kemaslahatan umat, dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memenuhi ambisi politik kekuasaan pribadi maupun untuk membantu mengembangkan ideologi dan ormas keagamaan tertentu.

Yang diperdebatkan adalah bukan soal boleh atau tidaknya ulama masuk kekuasaan melainkan mampu dan tidaknya mereka jika ikut berkompetisi dalam dunia politik kekuasaan yang profan dan penuh intrik, disini diperlukan syarat berupa kompetensi personal yakni kualitas individu, integritas moral, dan kemampuan untuk memahami politik dengan baik.(Millah,2018)

Hal ini dibuktikan saat perombakan DPP Partai Demokrat, dimana dirinya tetap dipertahankan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dibawah jabatan Ibas Yudhoyono (Sekjen Partai) pasca ditangkapnya Anas Urbaningrum. Terkait dugaan pembagian uang suap di RAPIMNAS Demokrat di Bandung, Syofwatillah pernah diperiksa KPK sebagai saksi pada 10 Desember 2013. (twitter, 2020)

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Hal ini disebabkan oleh alur penelitian dari umum ke khusus, yang maksudnya adalah bahwa penelitian ini berawal dari hasil pengamatan terhadap fenomena yang ada di lapangan. Yang dalam hal ini adalah pendapat peran politik oleh ulama dari *Syofwatillah*. Kemudian, peneliti berusaha untuk menganalisisnya dengan menggunakan teori dan konsep yang berkaitan dengan fenomena tersebut. sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karena peneliti juga ingin menganalisisnya dan menjelaskan peran ulama dalam dunia politik ini secara lugas dan jelas. dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur ini bersumber dari sejumlah artikel dalam jurnal, buku, konten media informasi yang berkaitan dengan fokus dari isu penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Ulama merupakan tokoh atau orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama dengan baik. Ulama sebagai pigr dan tauladan bagi orang-orang disekitarnya; dan secara umum ulama

adalah tempat bertanya serta mengetahui berbagai ilmu sesuai dengan bidang ulama tersebut. Politik merupakan sebuah strategi untuk mencapai sebuah tujuan, dari jenisnya politik terbagi dua yaitu politik yang bertujuan baik dan politik yang bertujuan tidak baik. Bagaimana ulama yang berkecimpung di dunia politik, apakah pantas bagi mereka, sehingga dalam tulisan ini dikaji dengan tema Ulama dan Politik (Nurdinah, 2016).

Ulama adalah bentuk majemuk dari kata dalam bahasa Arab “alim” yang secara harfiah yang berarti orang yang berilmu, lawan kata ilm (Ilmu) adalah jahil (bodoh). Latar belakang pengertian ini selalu dihubungkan dengan istilah ilmu pengetahuan agama, baik dalam pengertian genosis maupun pengertian eksotis hukum agama (Khoiril, 2016). Pada masa-masa paling awal Islam yang disebut ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu – ilmu agama. Pada masa al-Khulafaur-Rasyidin tidak ada pemisahan antara orang yang memiliki pengetahuan agama, ilmu pengetahuan ke alaman, dan pemisahan politik praktis. Para sahabat Nabi saw umumnya memiliki pengetahuan keagamaan, pengetahuan keagamaan dan sekaligus mereka juga pelaku-pelaku politik praktis.

Para sahabat terkemuka pada masa itu biasanya duduk dalam satu dewan pertimbangan yang disebut Ahl al-Halli wa al-Aqd. Oleh ulama, para sahabat ini kemudian disebut ulama salaf. Baru pada masa pemerintahan Bani Ummayyah dan sesudahnya, istilah ulama lebih ditekankan kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan keagamaan saja. "Bahkan karena ada pembidangan ilmu agama, istilah ulama lebih dipersempit lagi." (“Ulama dan Politik - Aneka Ragam Makalah”) Misalnya ahli fiqh disebut fuqaha, ahli hadits disebut muhaddisin, ahli kalam disebut mutakallim, ahli tasauf disebut mutasawwif, ahli tafsir disebut mufassir. Sementara itu orang yang memiliki ilmu kealaman tidak lagi disebut dengan ulama, tetapi disebut ahli dalam bidang masing-masing.

Di Indonesia, istilah ulama atau alim ulama yang semula disebutkan dalam bentuk jamak berubah pengertiannya menjadi bentuk tunggal. Pengertian ulama lebih menjadi sempit, karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan ilmu 2 keagamaan dalam bidang fiqh, di Indonesia ulama identik dengan fuqaha, bahkan dalam pengertian awam sehari-hari ulama adalah fuqaha dalam bidang ibadah saja. Betapapun semakin sempit pengertian ulama dari dahulu sampai sekarang, namun ciri khasnya tetap tidak bisa dilepaskan, yakni ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu diajarkan dalam jangka khasyyah (adanya rasa takut atau tunduk) kepada Allah swt. "Ada beberapa macam istilah atau sebutan bagi ulama di Indonesia." (“Ulama dan Politik - Aneka Ragam Makalah”)

Di Aceh disebut Teungku, di Sumatera Barat disebut Tuanku atau Buya, di Jawa Barat disebut Ajengan, Jawa tengah dan Jawa Timur Kiyai, Banjar (Kalimantan Selatan) sulawesi dan NTT disebut Tuanku Guru. Ulama bentuk jamak dari alim “terpelajar” (cendikiawan) orang-orang yang diakui sebagai cendikiawan atau sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam. Mereka adalah para imam masjid-masjid besar (agung) para hakim, guru-guru agama pada Universitas dan secara umumnya merupakan lembaga kelompok terpelajar atau kalangan cendikiawan keIslaman yang memiliki hak penentu atas permasalahan keagamaan. Khususnya dalam sistem monarkis yang turun-temurun.

Para penguasa dikukuhkannya melalui keputusan dewan ulama. Untuk menguatkan kekuasaannya dalam memegang tampuk pemerintahan. Ulama selalu memegang legitimasi dalam urusan pemerintahan dan keagamaan. Ulama dalam arti luas adalah kaum cerdik-cendikia dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Sejalan dengan kelengkapan ajaran al-Qur’an dan sunnah yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Maka para ulama (dalam pengertian luas) dan lebih-lebih ulama dalam pengertian sempit yaitu yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu agama. Secara jama’i dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat menuju perkembangan hidup yang sehat, sejalan dengan nilai-nilai ajaran al-Qur’an dan Sunnah.

"Ulama juga memperkokoh jalinan mereka dengan masyarakat umum melalui penanganan peradilan, dan santunan, dan harta waqaf, dan dengan memimpin shalat jama’ah dan berbagai upacara perayaan kelahiran, perkawinan, dan kematian." (“Ulama dan Politik - Aneka Ragam Makalah”) Jalinan mereka dengan sejumlah besar para artisan, kaum pekerja (buruh), dan elit pedagang 4 sangat besar pengaruhnya. Pengaruh ulama dalam bidang politik dapat kita lihat dalam keterangan Ira M Lapidus yang mencontohkan di Negara Qatar, bahwa pertalian ulama dengan rezim Qatar tidak jelas. Di balik melemahnya rezim Qatar, terdapat preseden sejarah yang berharga berupa kalaborasi antara elit Negara dan elit ulama.

Kalangan ulama secara kuat terpengaruh kepada tradisi ketidak pedulian (*Quitisme*) dan penghindaran diri terhadap keterlibatan secara aktif dalam urusan politik. Etos mereka menghendaki pemusatan pada permasalahan teologis dan urusan keagamaan dan penghormatan terhadap otoritas Negara dalam seluruh aspeknya, dan mereka bergantung kepada Negara untuk pelimpahan jabatan tertentu, untuk mendapatkan tunjangan, pemberian tanah, dan untuk sekolah – sekolah. Fath ali Shah (1797-1834), yang secara kritis menyandarkan kekuasaan pada beberapa

kekuatan kesukuan, membangun sejumlah makam suci, mengangkat ulama untuk beberapa jabatan pemerintahan, dan menghormati mereka sebagai mediator antara pemerintah dan rakyat. Ia mentolerir independensi ulama-ulama besar dari kalangan bangsawan, misalnya Sayyid Muhammad Baqir di Isfahan, yang pengaruhnya didasarkan pada kekayaan atas sejumlah tanah, penguasaannya atas harta kekayaan agama, dan dukungan dari tokoh – tokoh kuat tentara.

Seperti yang dinyatakan di atas, peran ulama dalam politik pertama kali dapat ditelusuri ke zaman awal-awal perkembangan Islam, sesaat setelah Rasulullah saw. meninggal dunia. "Momentum peran ulama dalam politik baru terlihat setelah Rasulullah saw." ("Ulama dan Politik - Aneka Ragam Makalah") meninggal dunia. Hal ini dikarenakan di dalam Islam, Rasulullah memegang jabatan sebagai pemimpin agama dan politik, meski tentu saja dalam kebijakan politik beliau terdapat kesempatan bagi para ulama untuk berpartisipasi (Yakub, 2019).

Atmosfir politik saat ini sebenarnya bukan menjadi hal yang baru, Syofwatillah memaparkan peran ulama pada perkumpulan pondok pesantren Global Mandiri pada saat beliau menjabat menjadi anggota DPR RI. Pada saat itu dihadiri oleh para ulama pondok pesantren. Pada masa itu dilakukan diskusi mengenai peran seorang ulama saat masuk ke dalam dunia politik.

Syofatillah menjelaskan bahwa politik juga bisa dikatakan sebagai tentang legitimasi kekuasaan dalam hal Negara, dan juga merupakan suatu hal yang terlepas secara langsung dari yang namanya moralitas yang tercermin pada situasi konkrit Negara yang membutuhkan tindakan tersebut. Negara adalah sisi nyata dari perpolitikan, dengan itu maka untuk mempertahankan negara, pengabaian terhadap sifat sifat yang berbau moral dapat saja di hilangkan oleh seorang penguasa. Dalam berpolitik peran ulama sangatlah penting karena dapat mengontrol kebijakan penguasa dan menjadikan pihak penguasa dan pihak oposisi. Ulama di tekankan memiliki dua peran yang mana dianggap sangat penting, yang pertama, berdasarkan pada bobot keilmuannya maka para ulama sudah sepantasnya sebagai penercerah alam pemikiran umat. Yang kedua ada sebagai panutan umat dalam artian khusus dalam keteladanan moral yang di ajarkan dan di contohkan ulama kepada masyarakat.

Menurut H. Ahmad Fauzan seorang ulama yang mendirikan rumah Tahfidz Sumsel, saat ditanya mengenai peran seorang ulama yang terjun ke dunia politik :

“Seorang ulama yang terjun ke dunia politik, dalam sudut pandang Islam ulama tersebut memiliki kedudukan mulia. Seorang ulama bisa memberikan wawasan kepada masyarakat luas dengan keilmuan yang mereka miliki. Ulama yang terjun ke dunia politik juga harus tetap dalam syariat-syariat agama. Sah-sah saja

seorang ulama yang mau nyemplung kedunia politik. Segala hal tersebut wajar saja karena ulama memiliki kedudukan yang strategis dalam masyarakat. Menjadi seorang ulama yang diucapkan dan dilakukan menjadi sorotan termasuk sikap dalam pilihan politiknya yang sangat mungkin mampu mempengaruhi pilihan politik masyarakat luas”.

Saat ditanya mengenai resiko ulama terjun kedunia politik, berikut jawaban H. Ahmad Fauzan :

“Resiko pasti ada, ulama yang terjun ke dunia politik harus siap terhadap hantaman ataupun ancaman-ancaman dari pihak luar. Yang terpenting seorang ulama tersebut mampu mengatasi masalah dan ancaman tersebut. Dan selalu saya katakan seorang ulama tetap menjalankan tugas-tugasnya dalam dunia politik sesuai dengan koridor Islam”

Secara etimologis ulama berarti seseorang yang memiliki ilmu dan pengetahuan agama yang mumpuni. Secara terminologis Al Qur’an menyebut ulama sebagai sosok yang memberi pencerahan pada umat manusia.

Menurut KH. M.A. Sahal Mahfudzah berpendapat bahwa :

“Ulama adalah mereka yang mempunyai kelebihan atau ahli dalam bidang ilmu ilmu dalam agama yaitu agama islam, seperti ahli dalam tafsir ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa arab dan yang lainnya seperti saraf, nahwu, balaghah dan masih banyak lainnya terutama dalam bidang ilmu agama islam. Membimbing umat islam baik dalam masalah agama maupun dalam masalah sosial yang diperlukan baik dari sisi keagamaan ataupun dalam lingkungan masyarakat. Karena pada dasarnya ulama juga berperan sebagai pembimbing moral.”

Isu-isu aktual dinamika demokrasi menjadi hidangan yang lezat untuk diperbincangkan oleh seluruh kalangan masyarakat mengenai tokoh agama dan ulama dengan gamblang ikut berkecimpung dalam dinamika perpolitikan, selalu menarik untuk didiskusikan bahkan tidak banyak media massa yang ikut turut serta membahasnya.

Peranan ilmu politik sebagai suatu khazanah keilmuan ruang lingkup ranah pembahasannya dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) ranah, yaitu: pemikiran, kelembagaan, dan kekuasaan. Terkait hal tersebut kajian tentang teori dan kekuasaan sampai sekarang masih relevan untuk dibahas. Sumbangsih paling besar teori ini terhadap ilmu politik adalah untuk memahami konfigurasi politik di suatu arena publik.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). "Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan." (“Pengertian Peranan dan Teorinya - Dunia Pengertian”) Seperti salah satu tokoh politik yaitu

Syofwatillah, beliau melaksanakan peranan pada dunia politik untuk yang terakhir kali pada tahun 2019.

Menjadi seorang ulama sekaligus politikus tentu bukan hal yang mudah sebagai ulama, Syowfatillahtentu berpegang teguh dengan peraturan agama. Namun, sebagai politisi juga dituntut untuk mengikuti dinamika dunia politik. Sehingga hal-hal tersebut menyebabkan kendala dalam mengakomodasikan dunia agama dan politik yang banyak sekali dirasakan oleh Syowfatillah.

Syofwatillah kembali menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 50.138 suara. "Saat menjadi anggota DPR 2009-2014, Syofwatillah terus-menerus berada di komisi VIII (Kesejahteraan Sosial) dengan jabatan sebagai wakil ketua komisi." ("Anggota DPR - Syofwatillah Mohzaib - JejakParlemen")

Syowfatillah mulai ikut serta dalam politik pertama pada tahun 2009 dimana pada tahun tersebut dia menjadi wakil rakyat DPR RI dari dorongan keluarga orang terdekat dan juga dorongan dari diri untuk bisa mengabdikan kepada masyarakat dengan menjadi wakil rakyat dalam sistem pemerintahan.

"Syofwatillah menjelaskan perannya sebagai wakil rakyat di DPR RI periode 2009-2014 dan juga berperan sebagai ulama ialah sebagai mengontrol keadaan sosial keagamaan dalam kehidupan dimasyarakat yang berperan juga sebagai ulama dalam keseharian, dengan bersikap adil dan jujur dalam mengemban tugas sebagai penyambung aspirasi masyarakat" (Syofwatillah Mohzaib : 17 Januari 2022).

Dalam penjelasan ini Syowfatillah menjelaskan perannya sebagai DPR RI periode 2014-2019, dimana dalam penuturannya Syowfatillah menyampaikan bahwa peran politiknya sebagai ulama pada DPR RI periode 2014-2019 ialah sebagai insan pengontrol keadaan sosial keagamaan dalam kehidupan masyarakat, dengan bersikap adil dan jujur dalam mengemban tugas sebagai penyambung aspirasi masyarakat ialah juga sebagian nilai dari ilmu keagamaan dari Syowfatillah yang dijunjung dan menjadi acuan bagi Syowfatillah dalam berperan politik sebagai anggota DPR RI Periode 2014-2019.

Kajian tentang hubungan antara ulama dan politik, yang merupakan pusat perhatian dalam studi ini, memang telah lama menjadi objek diskusi dan juga polemik di kalangan intelektual. Bahkan, belakangan terus berkembang dalam berbagai studi. Hal ini antara lain; karena memang harus diakui, bahwa keterlibatan ulama dalam kancah perpolitikan di berbagai

negara, selalu saja memiliki pengaruh kuat dalam perpolitikan global.

Ketika mencermati bagaimana pengalaman sejarah sosial yang terjadi di belahan dunia, kaitannya dengan hubungan ulama dan politik, memang akan tampak sekali berbagai kerumitan yang dihadapi. Hal ini pula yang kemudian menjadi penting untuk dilakukannya diskursus tersendiri mengenai hal tersebut, karena bagaimanapun, warisan politik yang ditinggalkan masa lalu, oleh masa kini akan tetap terus dibawa dan dipandang normatif oleh generasi selanjutnya.

Menurut H. Ahmad Fauzan seorang ulama pendiri rumah tahfidz Palembang saat ditanya mengenai kontradiksinya seorang ulama yang terjun ke dunia politi, ialah :

“Keterlibatan ulama dalam suatu proses demokrasi tidak lepas dari mayoritas masyarakat kita yang beragama Islam. Mereka memiliki anggapan bahwa apabila pilihan ulama tersebut ialah yang paling benar karena ulama telah mengetahui seluk beluk dari konsep agama dan ilmu keduniawian. Tetapi hal tersebut akan berdampak buruk bila ulama malah terjun dan terjerumus dalam pragmatisme politik, yakni politik dengan kepentingan pribadi guna memperkaya diri serta menggunakan segala macam cara untuk bisa menggapai apa yang dia inginkan bukan untuk kepentingan masyarakat akan tetapi untuk dirinya pribadi. Sehingga baik buruknya ulama yang terjun ke dunia politik itu, balik lagi ke niat diri mereka masing-masing. Selagi niat mereka karena Allah, saya yakin seorang ulama yang terjun ke dunia politik akan mendapat dukungan baik dari masyarakat ataupun Allah SWT.”

M. Din Syamsuddin dalam penelitiannya menyebutkan, bahwa keterkaitan antara Islam dan politik dalam konteks sosio – kultural dan sosial – politik dimasing – masing negara, sejatinya mendorong mereka (intelektual/ulama) untuk tetap terus berupaya merumuskan bentuk polarisasi dan/atau mencari pemecahan masalah serta mengimplementasikan ide-ide mereka, khususnya dalam situasi politik tertentu, sehingga keberhasilan maupun kegagalan dalam memperoleh gambaran obyektif dari tujuan umumnya polarisasi tersebut dapatlah terukur.

Peran Ulama dalam Politik di Indonesia Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia. Hal ini berdasarkan data dari *The Pew Forum on Religion & Public Life*, sebuah lembaga riset global pada tahun 2012. Penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk Indonesia. Jumlah itu merupakan 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar menyebabkan peran ulama sebagai tokoh agama dalam Islam menjadi krusial. Dalam Islam ulama memiliki

kedudukan mulia.

Sebagian masyarakat ada yang pro dan kontra akan keterlibatan ulama dalam perpolitikan di Indonesia. Ulama dalam kaitan peran politik tidak didahului dengan diskusi dan wacana yang jelas meskipun dalam tataran empiris peran ulama dalam politik tidak terbantahkan. Akan tetapi secara normatif sebenarnya ulama seharusnya bersih dan steril dari politik dan lebih bergerak pada bidang tafsir agama.

Ulama adalah mereka yang mempunyai kelebihan atau ahli dalam bidang ilmu dalam agama yaitu agama islam, seperti ahli dalam tafsir ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa arab dan yang lainnya seperti saraf, nahwu, balaghah dan masih banyak lainnya terutama dalam bidang ilmu agama islam. Membimbing umat islam baik dalam masalah agama maupun dalam masalah soaial yang diperlukan baik dari sisi keagamaan ataupun dalam lingkungan masyarakat. Karena pada dasarnya ulama juga berperan sebagai pembimbing moral.

Semangat tersebut kemudian yang mampu mengerakkan, dan menjadikan santri tidak hanya sebagai kaum terpelajar dan mendalami Islam, tapi sewaktu- waktu mereka mampu menjadi singa dan berada di barisan terdepan dalam membela Islam dan negara. Pembahasan mengenai ulama dalam kancan politik bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia, sejak dulu terutama dalam masa orde baru ulama memiliki peran penting yang digunakan sebagai stempel dalam melegitimasi aturan hukum dan kebijakan politik. Pertanyaan yang muncul ialah apakah ulama akan selalu menjadi legitimasi sang penguasa yang dahulu juga pernah terjadi pada saat berlangsungnya “Demokrasi Terpimpin”. Sejarah menunjukkan bahwa ulama tampak lebih cocok dalam posisi itu. Peran dalam memberikan legitimasi politik tersebut yang minim resiko bagi eksistensi dan legitimasi ulama di mata umatnya.

KH Basori menegaskan bahwa keterlibatan ulama dalam berpolitik itu hal yang wajar baik hanya menjadi tim sukses salah satu pasangan calon atau terjun langsung menjadi pelaku dengan mencalonkan diri sebagai calon pemimpin karena pada dasarnya berpolitik merupakan hak dari setiap warga negara tidak peduli apapun profesi yang mereka miliki. Hal ini akan sangat rancu jika keterlibatan ulama justru di permasalahan karena sejatinya akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945. Meskipun tidak terlibat secara langsung akan tetapi KH Basori menegaskan bahwa sebagai seorang ulama penting untuk tetap mengetahui berbagai kajian politik yang ada agar tidak diperdaya oleh pragmatisme politik yang saat ini marak terjadi. Seorang ulama harus memiliki pengetahuan luas dan terbuka terhadap

politik.

Berbagai resiko harus ditanggung jika ulama memutuskan terjun ke politik. Sebagian masyarakat mungkin masih percaya akan kredibilitasnya akan tetapi hal itu hanya pada titik tertentu saja. Pada dasarnya ulama memegang peranan dalam proses menarik simpati masyarakat dan sewaktu-waktu hal ini akan dimanfaatkan oleh para politikus agar apa disampaikan dapat dipercayai masyarakat. Membawa isu agama masih sangat dimungkinkan saat ini, hal ini karena masyarakat mudah terpancing oleh isu yang sengaja dibuat untuk menggiring opini publik. Hal ini kadang dimanfaatkan oleh beberapa pihak guna membawa nama agama yang sensitif guna memberikan pendapat akan bela agama dan memancing amarah publik, yang berimbas pada masyarakat akan memilih pemimpin yang religius guna menjadi corong untuk membela agama, hal ini bukan sesuatu yang salah akan tetapi secara umum hal ini tidak bisa dikatakan sportif.

Berikut petikan wawancara penulis dengan Tokoh Politik Syofwatillah Mohzaib, pertentangan yang terjadi kepada Syofwatillah Mohzaib sebagai ulama yang terjun ke dunia politik :

“Pertentangan yang terjadi saat terjun ke dunia politik pasti ada misalnya saja sulitnya menghindarkan diri kita dari praktek-praktek kecurangan dalam arena politik, menghindari dari mengambil hak rakyat untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita harus berpegang teguh pada agama, agar hal-hal yang tidak baik dapat kita hindari.”

Peran Keulamaan Syofwatillah Mohzaib sebagai anggota DPR RI Sumatera Selatan 2014-2019 ialah sebagai yang mengontrol keadaan sosial keagamaan dalam kehidupan dimasyarakat dengan bersikap adil dan jujur dalam mengemban tugas sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Dimana pada penjelasannya mengutarakan sebagai berikut :

“Peran saya sebagai wakil rakyat di DPR RI periode 2009-2014 dan juga berperan sebagai ulama ialah sebagai mengontrol keadaan sosial keagamaan dalam kehidupan dimasyarakat yang berperan juga sebagai ulama dalam keseharian, dengan bersikap adil dan jujur dalam mengemban tugas sebagai penyambung aspirasi masyarakat”

Dari penjelasannya Syowfatillah menjelaskan perannya sebagai ulama dalam keanggotaannya dalam DPR RI Sumatera Selatan 2014-2019 yang menjadi tanggung jawabnya sebagai tugas ulama sebagai pengontrol sosial nilai keagamaan dalam kehidupan dimasyarakat.

Peran politik Syofwatillah Mohzaib sebagai anggota DPR RI Sumatera Selatan 2014-2019 merupakan peran politik terakhir beliau dalam dunia politik. Dimana pada tahun inilah

Opat telah bertugas selama dua keperiodean anggota dua periode.

“Saya mengutarakan selama menjadi anggota DPR RI ialah saat menjabat menjadi anggota DPR RI dimana setiap Anggota dewan wajib mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi, dimana tiap anggota dewan wajib untuk menanggapi dan merealisasikan suara dari rakyat yang memilih anggota sebagai fasilitator penyampai pesan rakyat. Syowfatillah melanjutkan tetap berpegang teguh kepada nilai agama demi keberlangsungan demokrasi yang adil dan mensejahterakan rakyatnya yang mengamanahkan suara mereka kepada DPR yang dipilih.”

Dimana dalam peran politik Syowfatillah selama menjadi anggota DPR RI dimana setiap anggota dewan mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadinya, dimana tiap anggota dewan wajib menerima dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang berharap direalisasikan oleh pemerintahan.

Kontradiksi dari peran keulamaan Syowfatillah selama menjadi anggota DPR RI Sumatera Selatan 2014-2019. Mengutarakan bahwa setiap keputusan pasti akan menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, apalagi didalam hal ini yang dikenal masyarakat sebagai ulama, akan tetapi memilih keputusan untuk ikut terjun kedalam dunia politik dan ingin mengabdikan didalam masyarakat. Tapi nyatanya didalam masyarakat terjadi pro dan kontra dan mengakibatkan kontradiksi didalam masyarakat, karena dengan ulama yang dikenal masyarakat membuat berbagai pandangan terhadap Syowfatillah yang menjadi anggota DPR RI.

Mneurut Muhammad Amin, MS, “Peran serta ulama di politik bukan sebuah rahasia lagi. Hal ini tidak terlepas dari hak warga negara yang memang diperbolehkan untuk berkecimpung dalam dunia politik. Akan tetapi dalam hal ini politik yang diterapkan diharapkan bukan politik praktis yang mengarah pada pragmatisme politik, akan tetapi harus berlandaskan kepada ideologi Pancasila dan memegang teguh kebhinekaan serta membawa perubahan kearah yang lebih baik bagi kesejahteraan rakyat. Hal tersebut yang menjadi tujuan dari sebagian besar ulama yang memutuskan untuk bergabung dalam dunia politik, dimana tujuannya ialah melakukan perubahan secara struktural dan luas dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Sebagian masyarakat setuju akan hal ini tapi sebagian lagi merasa bahwa ulama lebih cocok untuk mendalami ilmu agama tanpa ikut campur tangan dalam dunia politik, hal ini tergantung dengan perspektif masing-masing.”

Keterlibatan ulama dalam politik digolongkan menjadi beberapa kelompok yakni ulama yang mendukung politik secara praktis, supporter (hanya sebagai tim sukses), atau sekedar guru

spritual yang memberikan doa restu (*invisible hand*) serta ulama yang hanya berfokus pada kajian pendidikan dan sosial yang hanya sebagai pengontrol jalannya pesta demokrasi. Karena pada dasarnya ulama harus mampu menguasai ilmu politik meskipun tidak terlibat secara langsung agar terhindar dari tipu daya politik yang menyebabkan ulama menjadi korban kekuasaan dan di politisasi oleh golongan tertentu yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat padahal hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Ulama yang sampai saat ini tidak mendukung kepentingan politik golongan tertentu dan menjaga jarak dari politik praktis kekuasaan sudah jarang ditemui.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Kontradiksi Antara Keulamaan dan Peran Politik Analisis Syofwatillah Mohzaib Selama menjadi Anggota DPR RI Sumatera Selatan Periode 2014-2019 sebagai berikut :

1. Peran politik Syofwatillah Mohzaib saat menjadi anggota DPR RI Sumatera Selatan Periode 2014-2019 ialah menjadi seorang ulama sekaligus politikus yang berpegang teguh dengan peraturan agama. Pada masa menjabat menjadi anggota DPR Periode 2014-2019 Syofwatillah Mohzaib juga sebagai ketua pondok pesantren UIGM. Ditengah-tengah kesibukannya sebagai ketua pondok pesantren serta pelaku politik, Syofwatillah Mohzaib juga berpartisipasi langsung dalam mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat sekitarnya. Salah satu permasalahan disekitarnya ialah pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi. Aktifitasnya dalam pemberdayaan masyarakat ia mulai dengan mendirikan biro pondok pesantren dan masyarakat. Namun, sebagai politisi Syowfatillah juga dituntut untuk mengikuti dinamika dunia politik. Sehingga hal-hal tersebut menyebabkan kendala dalam mengakomodasikan dunia agama dan politik yang banyak sekali dirasakan oleh Syofwatillah Mohzaib.
2. Peran Ulama Syoefatillah Mohzaib dimana dalam penelitian ini mengemukakan peran ulama yang dijalani Syowfatillah sebagai ulama yaitu menjadi tanggung jawabnya untuk mengontrol kondisi sosial keagamaan dalam masyarakat, dengan menjadi dasar dan tuntunan dalam kehidupan masyarakat. Pada perannya sebagai ulama dia menjadikan nilai kegamaan sebagai nomor satu serta tuntutannya dalam bersikap.
3. Kontradiksi yang didapati dari penelitian ini ialah peran sebagai politikus dan ulama yang bisa dikatakan sangat bertentangan, dimana dewasa ini dinamika politik yang terjadi di Indonesia dianggap sebagian masyarakat menyesatkan dan tidak adil lagi mensejahterakan kehidupan masyarakatnya, sedangkan peran ulama ialah sebagai tuntunan atau penyampai syiar-syiar kebajikan dalam kehidupan yang adil dan memanusiakan. Dari kedua peran ini Syowfatillah mengungkapkan tetap berpegang

teguh kepada nilai keagamaan dan menjadi dasar dalam bersikap tapi tentu harus mengikuti dinamika politik saat ini. Dengan ini Syowfatillah bersikap dengan mengambil keputusan kalau dianggapnya masih sesuai dan berlandaskan nilai agama yang adil dan mensejahterakan ia pasti akan menyetujuinya dan ikut bersuara, akan tetapi jika sebuah keputusan yang diambil anggota DPR yang lain dianggapnya tidak berkepentingan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Syowfatillah akan menentang dan bahkan tidak akan mengikuti jalannya kebijakan tersebut.

B. Saran

Ulama yang ikut andil dalam politik di Indonesia semakin hari semakin menjadi hal lumrah, peran ulama sebagai tim sukses maupun bakal calon dalam hal ini akan menimbulkan kontradiksi yang terjadi dalam peran ulama dan peran politik yang dilaksanakannya. Adapun dari kontradiksi yang terjadi antara peran politik dan peran ulama tersebut peneliti memiliki saran sebagai berikut :

1. Dalam pengaplikasian politik dan ulama yang memiliki kontradiksi didalamnya mengenai peran politik dan peran ulama itu sendiri, dari peran politik yang dilakukan ialah untuk meraih apa yang ingin dicapai melalui propaganda-propaganda didalamnya, sedangkan nilai keagamaan sendiri selalu mengajarkan dan mengutamakan kejujuran dan keadilan didalam kehidupan, penulis mengharapkan akan ketegasan dan kemantapan ulama yang telah terjun kedalam politik guna mencapai tujuan keadilan dan mensejahterakan masyarakatnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya peneliti mengharapkan bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam dan spesifik karena pada penelitian ini peneliti sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini.

REFERENSI

- Amin, M. (2009). *Mengislamkan kursi dan meja: dialektika ulama dan kekuasaan*. Pustaka Pelajar.
- Anwar, M. K., & Afdillah, M. (2016). Peran ulama di nusantara dalam mewujudkan harmonisasi umat beragama. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 4(1), 80-95.
- Basyar, M. H. (2016). Dinamika Peran Ulama dalam Perpolitikan Nasional Pasca-Orde Baru. *Jurnal Penelitian Politik*, 5(1), 73-83.
- Cliford, Geertz. (1960). *The Religion of Java*, Amerika Serikat: The Free Press.
- Dar, M. (2018). Kiprah ulama dalam sejarah sosial politik aceh. *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan*, 5(1).
- Diponegoro, A. M. (2016). *Ulama Sebagai Kekuatan Politik: Peran Ulama Nahdlatul Ulama Dalam Kemenangan Ipong Muchlissoni Di Pilkada Langsung Kabupaten Ponorogo*

- 2015(Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Djohan, D. (2005). Masalah Krusial Pilkada. *dalam dalam Djohermansyah*.
- Djohan, D., & Suwandi, M. (2005). Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan.
- Eksan, M., & Kelana, K. (2000). Biografi Kiai Muchith Muzadi. *Jogjakarta: Elkis Penlangi Aksara*.
- El-Guyanie, G. (2010). *Resolusi jihad paling syar'i: biarkan kebenaran yang hampir setengah abad dikaburkan catatan sejarah itu terbongkar!*. Penerbit & distribusi, Pustaka Pesantren.
- Hadiwijono, H. (1980). *Sari sejarah filsafat barat*. Kanisius.
- Hasan, M. I. (2002). Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya.
- Hasan, R. (2013). Peranan Dan Sikap Transformasi Politik Ulama Dalam Menghadapi Pemilu 2014 Di Aceh. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 503-521.
- Husain, Husman, Purnomo Stiady dan Amar. (2001), *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara
- Janarko, F. (2016). *Pengaruh Kepemimpinan dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Variabel Kepercayaan* (Doctoral dissertation, UII Yogyakarta).
- Muslim, K. L. (2019). Gugatan terhadap Kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol. *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama dan Humaniora*, 23(1), 17-26.
- Nahdli, A. F. M. *Keterlibatan Ulama Dalam Politik (Studi Terhadap Peran Ulama Dalam Kemenangan Idris-Pradi Pada Pemilukada Kota Depok Tahun 2015)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Prinsip-prinsip Demokrasi - KOMPAS.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/150000469/prinsip-prinsip-demokrasi>.
- Putra, O. E. (2016). Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik di Indonesia. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 13(1), 67-80.
- SALAMIAH, E. Z. (2019). *Peran Ulama Dalam Pragmatisme Politik Pada Pilgub 2018 (Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Twitter. <https://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef81f>. Di akses pada tanggal 10 september 2020, 14:00
- Ulama dan Politik - Aneka Ragam Makalah*, <https://www.anekamakalah.com/2012/04/ulama-dan-politik.html>.17
- Zalika eka. 2019. *Peran Ulama Dalam Pragmatisme Politik Pada Pilgub 2018*. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.